

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa dan daerah-daerah tertinggal sejak lama menjadi agenda pemerintah sebagai tujuan pembangunan nasional karena desa merupakan sasaran riil yang harus disejahterakan dan juga kemiskinan masih mendominasi dipedesaan yang ada di Indonesia, dengan adanya pembangunan desa diharapkan dapat membangun kemandirian desa agar tidak bergantung dengan pusat. Untuk mendorong pembangunan tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sesuai Pernyataan Peraturan tentang BUMDes ini di atur pula dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Pasal 87: (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMdes. (2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan.

BUMDes merupakan salah satu usaha desa dalam bentuk lembaga yang pengelolaanya dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa guna mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa atau termasuk usaha dari desa, oleh desa dan untuk desa, namun dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada kebutuhan masyarakat dan potensi desa yang ada. Sebagai lembaga ekonomi di pedesaan, BUMDes harus berbeda dengan lembaga ekonomi lainnya supaya dengan keberadaan serta kinerja BUMDes dapat berkontribusi dalam mewujudkan

kesejahteraan bagi masyarakat desa. Selain itu juga untuk mencegah adanya usaha yang memiliki sistem kapitalis di pedesaan yang dapat mengganggu tatanan kehidupan di masyarakat.

Permendes No 4 tahun 2015 pasal 2 (dua) yang berbunyi pendirian BUMDes yang dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerja sama antar desa. Tujuan lain dari pendirian BUMDes adalah untuk mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki oleh desa, mengembangkan usaha masyarakat pedesaan, mengembangkan rencana kerja demi menciptakan peluang dan lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Pendirian BUMDes merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, transparansi dan akuntabel demi menunjang kemajuan ekonomi masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan ini, kinerja BUMDes sangat penting dan diperlukan agar kehadiran dan dalam proses pengelolannya mampu mencapai target sesuai yang direncanakan Bersama. Dengan kata lain dalam proses pengelolaan BUMDes diperlukan Langkah dan kinerja yang strategis serta taktis guna mengintegrasikan potensi dan kebutuhan pasar, sehingga kehadiran BUMDes diharapkan dapat menjadi *prime mover* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Di provinsi NTT terdapat 3.026 desa dan telah terbentuk 1.415 BUMDes, 624 BUMDes berstatus aktif. (Kemendes PDTT, 2021). Terdapat 66 badan usaha milik desa (BUMDes) dari 160 desa yang ada di Kabupaten Kupang. Salah satu

BUMDes yang ada di Kabupaten Kupang adalah BUMDes Ina Huk yang berlokasi di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan peraturan desa, muncul gagasan dari Kepala Desa Mata Air melalui musyawarah, Pemerintah desa dan kelompok warga untuk membahas isi strategis salah satunya mendirikan BUMDes. Dengan pertimbangan yang matang pemerintah Desa Mata Air mendirikan BUMDes pada tanggal 27 april 2018. Berdasarkan keputusan Peraturan Desa No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 maka di bentuklah BUMDes Ina Huk.

BUMDes Ina Huk telah mempunyai beberapa unit usaha diantaranya adalah unit usaha pertanian, pariwisata dan waserda. Secara singkat dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Penyertaan Modal	Sumber Modal	Keuntungan	Alokasi Keuntungan
1	Pariwisata	Rp 150.000.000	Dana Desa	Rp 27.723.299	Untuk pembayaran PaDesa dan pengelolaan BUMDes.
2	Pertanian	Rp 50.000.000	Dana Desa	Rp19.723.299	
3	Waserda	Rp 50.000.000	Dana Desa	Rp106.135.200	
			Jumlah	Rp153.581.798	

Sumber: Bendahara Bumdes Ina Huk (2022)

Dari ketiga jenis unit usaha BUMDes Ina Huk kontribusi laba BUMDes terhadap pendapatan asli desa belum memenuhi kebutuhan masyarakat karena laba

bersih yang didapatkan tidak di salurkan ke masyarakat melainkan untuk pembayaran PaDesa dan pengelolaan BUMDes.

Sebelum adanya BUMDes tidak ada pengelolaan dipantai sulamanda dan masyarakat melakukan aktifitas seperti biasa yaitu bertani.setelah adanya BUMDes Ina Huk, masyarakat mulai mengalami perubahan sedikit demi sedikit.BUMDes mulai mengelola aset desa yaitu pantai sulamanda tempat wisata untuk memberikan pemasukan terhadap Desa salah satunya mendirikan stan/tempat jualan dengan tujuan disewakan kepada masyarakat yang ingin berwirausaha seperti menjual snack kue dll. Selain memanfaatkan aset Desa, BUMDes juga memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya petani seperti memfasilitasi pupuk dan peptisida.

Berdasarkan hasil wawancara terdahulu (07/02/2022) yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu karyawan BUMDes Ina Huk,bapak Frans Naus mengatakan bahwa BUMDes Ina Huk awalnya hanya memiliki 2 jenis unit usaha yaitu, pariwisata dan pertanian. Seiring berjalannya waktu ada penambahan unit usaha waserda yang pengoperasiannya masih berjalan hingga saat ini.

Dalam beberapa tahun belakangan ini pengoperasian di unit pariwisata mengalami penurunan omset, diakibatkan adanya covid-19 sehingga unit pariwisata kurang berjalan dengan baik seperti tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 sampai Januari 2020 BUMDes Ina Huk mendapatkan laba bersih dari ke tiga unit usaha sebesar Rp. 19.517.016. Selain itu, pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Mata Air seharusnya dapat memperbaiki perekonomian masyarakat yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi

hal tersebut justru berbanding terbalik dengan realita di lapangan, di mana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di desa tersebut belum mampu mencapai tujuan utama dan menjalankan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara optimal. Sehingga sampai saat ini belum ada perbaikan perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat di desa Mata Air.

Berdasarkan beberapa hal yang telah disampaikan di atas, maka peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul **“Peran BUMDes Ina Huk untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mata Air Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahannya yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BUMDes pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat BUMDes Ina Huk untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mata Air

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran BUMDes pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

2. Untuk mengetahui factor-faktor yang jadi pendukung dan penghambat BUMDes Ina Huk untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

1.4 Manfaat Penulisan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang bersifat positif bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Secara Akademis

1. Bagi Civitas Akademika

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan penting bagi civitas akademika Universitas Katolik Widya Mandira Kupang pada umumnya dan Prodi Ilmu Administrasi Publik khususnya untuk memahami pentingnya Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti sendiri untuk memahami pentingnya Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan positif bagi pemerintah desa Mata Air dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan Badan

Usaha Milik Desa (BUMDes) agar pelaksanaanya lebih optimal dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai sasaran.